



**Judul** : Persoalan pendidikan bisa cepat dibereskan  
**Tanggal** : Kamis, 28 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Alokasi 20 Persen APBN

## Persoalan Pendidikan Bisa Cepat Dibereskan

KETUA Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen untuk anggaran pendidikan. Selama ini alokasi memang sebesar 20 persen, tapi penggunaannya tidak semua ke pendidikan.

Menurutnya, anggaran pendidikan ini diluruskan agar sepenuhnya murni digunakan untuk fungsi pendidikan. "Kami akan suarakan terus agar 20 persen itu murni ke pendidikan," tegas Mekeng dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Menurut Mekeng, kesejahteraan guru honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) berakar dari anggaran. "Kalau anggarannya ada, masalah yang ditiakkan guru honorer bisa diselesaikan, fasilitas dan sekolah yang rusak juga bisa diselesaikan," kata politikus Golkar ini.

Dia bilang, kehidupan guru honorer, tenaga pendidikan, hingga dosen masih memprihatinkan. Pekerjaan dan pengabdian me-

reka tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima. Rendahnya upah di bawah standar masih menjadi masalah yang menghantui mereka. "Ini menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional kita," kata dia.

Persoalan itu sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada mutu capaian akademis siswa Indonesia yang masih tertinggal di tingkat global. Hal ini berdasarkan hasil Tes Programme for International Student Assessment (PISA) dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Masalah pendidikan kita sudah dalam kondisi lampu merah," tandasnya.

Mekeng menambahkan, sengkaret masalah guru honorer tidak bisa dibebankan kepada satu kementerian saja. Diperlukan sinergi dan komitmen nyata lintas sektoral, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasintek),

Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB). "Kalau tidak diperhatikan dari sekarang, kita akan jauh semakin tertinggal," ucapnya.

Dia mengingatkan, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menegaskan, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Mekeng, anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk keperluan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang menyangkut sarana dan prasarana, kebutuhan siswa, termasuk guru. "Itu satu rangkaian," tandas legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Atas berbagai masalah tersebut di atas, kata Mekeng, Fraksi Golkar MPR berencana menyurati

Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Presiden juga dipastikan akan melihat kebutuhan rakyat karena semuanya berujung ke sana. "Mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif," harap anggota Komisi XI DPR ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan, lembaganya tengah menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan kesejahteraan dan jumlah guru honorer yang menumpuk di Indonesia. Salah satu strateginya adalah mengatur ulang kewenangan pengelolaan guru.

"Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda)," ujar Atip dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Melalui restrukturisasi kewenangan itu, jelas Atip, peng-

dalian formasi dan distribusi guru diusulkan dilakukan oleh Pempus, sementara pengendalian formasi dan distribusi pendidik selain guru serta tenaga kependidikan dilakukan Pemda. "Juga pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan Pempus," ujar Atip.

Sementara, penilaian kinerja, pembinaan karier, pengembangan profesi, penghargaan, kesejahteraan, serta perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama Pempus dan Pemda.

"Inilah yang kami ajukan sebagai grand design (rancangan utama) dan sudah merumuskannya di rancangan perubahan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," kata Atip.

Selain itu, Atip menyebut, saat ini terdapat sekitar 200-an ribu guru non-aparatur sipil negara (ASN). Penyebab menumpuknya jumlah guru non-ASN saat ini adalah pola rekrutmen yang belum maksimal. Karena rekrutmen guru ASN dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. ■ TIF